

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pendidikan muncul bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri di atas dunia (hidup) oleh karena manusia itu merupakan “homo educandum artinya manusia itu pada hakikatnya merupakan makhluk yang di samping dapat dan harus di didik, juga dapat dan harus mendidik.¹ Dengan demikian, pernyataan di atas memperluas arti pendidikan yang sebenarnya yang sementara ini orientasi manusia dengan pendidikan adalah dunia sekolah. Sesungguhnya pendidikan merupakan kegiatan yang selalu mendampingi hidup manusia, sejak dari bangsa yang sederhana peradabannya sampai bangsa yang tertinggi peradabannya.

Begitu pentingnya pendidikan, dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 122 disebutkan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang Republik Indonesia

¹Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 66.

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003), telah mengamanatkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 memberikan pengakuan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mendorong terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, kemudian secara lebih rinci dinyatakan pada pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 7.³

Penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal lebih mengedepankan prinsip demokratisasi dan fleksibilitas yang memberikan kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kegiatan belajar yang diyakini sebagai kebutuhan belajar yang sangat diperlukan (*community based education*), baik dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan maupun untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu melalui program pendidikan yang relevan. Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang meliputi pendidikan

²Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Depdiknas: 2003), h. 1.

³Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.7.

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Jika ditelaah lebih mendalam, Pendidikan Non Formal dapat dilihat dari beberapa persepektif, Pertama, Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan profesional, Pendidikan Non Formal dari segi sasaran meliputi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan, Kecakapan Hidup, Pemberdayaan Perempuan, dan kursus-kursus untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang disebabkan: usia, kemampuan ekonomi, dan lain-lain, sehingga tidak terlayani oleh pendidikan formal, maka sejak tahun 1998 pemerintah telah merintis terbentuknya pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah salah satu satuan Pendidikan Non Formal sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang dibentuk atau dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi

pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas masyarakat tersebut.

Direktorat pembinaan pendidikan masyarakat (Ditbindikmas), direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, non formal dan informal kementerian pendidikan dan kebudayaan merupakan institusi yang mengemban amanat pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Ditbindiknas berkomitmen memenuhi kebutuhan belajar nyata sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu cara yang ditempuh adalah memberdayakan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya.⁴

Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah, pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat/warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan fisik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah sebagai pengganti, melengkapi, dan menambah terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan di sekolah (Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah). Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan

⁴Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal & Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Standard dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*, (Jakarta, 2012), h. 1.

nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Diselenggarakannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dikatakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), karena di dalamnya menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Pada umumnya pengelola dan penyelenggara PKBM adalah masyarakat, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, melalui Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat propinsi atau kabupaten/kota).

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 26 ayat 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki ciri khas yaitu kemandirian yang merupakan ciri dari Pendidikan Berbasis Masyarakat. Pemerintah membantu pembiayaan sepanjang diperlukan, menggunakan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sarana prasarana belajar dan sumber belajar menggunakan apa yang ada di masyarakat, ijazah tidak menjadi tujuan utama, kebermaknaan pendidikan untuk memperbaiki hidup dan kehidupan warga masyarakat menjadi acuan, dan dukungan pemerintah bukan menjadi alat untuk intervensi melainkan hanya karena tanggungjawab untuk membangun sumber

daya manusia. Pendidikan berbasis masyarakat tidak menyiapkan pesertanya untuk pendidikan lanjutan, tetapi untuk masuk dunia kerja, namun tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbasis masyarakat artinya berada di tengah masyarakat, mengandalkan kekuatan masyarakat, dimiliki oleh masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat dan pengelolaan pendidikan ada di tangan masyarakat.⁵

Menurut buku petunjuk teknis pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikeluarkan Depdiknas tahun 2006 pembelajaran yang dapat dikembangkan, seperti: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui *playgroup*, tempat penitipan anak dan kegiatan sejenis; (2) Pendidikan Keaksaraan yang diarahkan pada keaksaraan fungsional guna melayani pendidikan masyarakat usia 10 – 44 tahun; (3) Pendidikan Kesetaraan yang dimaksudkan untuk menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan 9 tahun, guna melayani anak usia 7 -15 tahun yang tidak lulus sekolah atau putus sekolah melalui program paket A setara SD, Program Paket B setara SLTP, dan Program Paket C setara SLTA; (4) Pendidikan Berkelanjutan yang diarahkan pada berbagai latihan ketrampilan hidup yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidup warga belajar.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sebuah organisasi memerlukan suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, proses ini disebut manajemen. Program belajar yang diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar

⁵Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*,..... h.9

Masyarakat (PKBM) digali dari kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat yang dikaitkan dengan potensi lingkungan dan kemungkinan pemasaran hasil belajar, keterampilan fungsional terintegrasi dengan seluruh program pembelajaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan program pendidikan nonformal yaitu: (1) kondisi warga belajar, (2) kondisi sumber belajar, (3) daya dukung pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga organisasi masyarakat, dan (4) kemampuan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan program.⁶

Di Kota Banjarmasin terdapat 25 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan hanya 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insani, Al-Falah dan Melati. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Banjarmasin mengelola beberapa program di antaranya Program Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain dan TK, Program Keaksaraan, Program *Life Skill*. Keunggulan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi adalah berhak untuk melaksanakan ujian di tempat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu sendiri dan berhak mengeluarkan ijazah yang di tandatangi oleh ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi akan mendapatkan dana bantuan 100 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi diberikan kemudahan untuk mengusulkan proposal

⁶M. Kamil, *Pendidikan Nonformal*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 59.

dan dibantu sarana dan prasarana untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).⁷

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk lebih ingin mengetahui dan mengadakan penelitian dengan judul “Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi di Kota Banjarmasin”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi di Kota Banjarmasin”, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian “Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi di Kota Banjarmasin”, adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi di Kota Banjarmasin.

⁷Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Herawaty Diah (Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insani), Sabtu, 25 Agustus 2018 jam 08.00.

2. Mendeskripsikan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual, serta manfaat praktis dalam pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian ke arah pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual, serta karakteristik yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Masukan bagi pengelola untuk pengembangan Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. Masukan bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam pengembangan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan operasional sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakkan dan pengendalian yang

dilakukan guna menentukan arah serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu satuan Pendidikan Non Formal sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang dibentuk atau dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas masyarakat itu.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis tidak menemukan penelitian tentang manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tetapi penulis menemukan ada sebuah literatur yang dengan fokus permasalahan yang berbeda dalam tesis yang sedang penulis teliti yakni dari Maisyarah. 2014, penelitian tersebut ialah Pembelajaran Matematika Paket C di PKBM An Nur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Pembelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran matematika dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran matematika di PKBM An Nur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dari proses pembelajaran matematika paket C di PKBM An-Nur cukup terlaksana dengan baik adapun factor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran matematika di PKBM An-nur Kecamatan Karang Intan yaitu faktor tutor, faktor warga belajar, faktor sarana dan prasarana dan faktor lingkungan.

Penelitian yang kedua adalah penelitian tesis saudari Sri Fatmawati, 2015, yang berjudul Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Pembinaan anak didik pemasarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan; (2) Problematika pembinaan anak didik pemasarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan; dan (3) Solusi yang dilakukan Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atas problematika yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat analisis kualitatif. Data-data yang digunakan, sepenuhnya bersumber di Lapas Klas II A Anak Martapura dan literatur yang terkait, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah pendekatan induktif. Terdapat beberapa temuan penelitian: (1) Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar pelayanan bagi warga binaan pemasarakatan. Pembinaan di Lapas Klas IIA Anak Martapura meliputi pendidikan dan pengajaran, bimbingan keagamaan, kegiatan kepemudaan, olah raga dan rekreasi, pembinaan kesenian dan keterampilan. (2) Problematika pembinaan yang dihadapi meliputi: (a) Pendidikan dan pengajaran adalah kurangnya minat anak didik, minimnya sarana belajar-mengajar, kegiatan belajar yang tidak efisien, bila habis masa tahanan anak tidak mau lagi meneruskan paket kesetaraannya baik di dalam

maupun di luar, dan kurang proaktifnya sekolah terhadap siswa yang berkonflik dengan hukum; (b) Bimbingan keagamaan yaitu banyak anak didik pemasyarakatan yang tidak bisa membaca alquran dan shalat dengan benar; (c) Kegiatan kepramukaan hanya dilaksanakan di dalam Lapas; (d) Rekreasi, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di Lapas, dan (e) Kesenian dan ketrampilan, kurangnya sarana dan prasarana dan tenaga instruktur yang profesional. (3) Solusi pembinaan yang dilakukan pihak Lapas: (a) Pendidikan dan pengajaran yaitu dengan memberikan motivasi bagi anak didik pemasyarakatan untuk menyelesaikan paket kesetaraan mereka baik di dalam maupun di luar Lapas. Memberikan fasilitas bagi siswa yang ingin ikut ujian akhir di Lapas. Memisahkan kegiatan belajar-mengajar antara napi laki-laki dan wanita. (b) Bimbingan keagamaan yaitu program baca tulis Alquran dan pelaksanaan shalat secara berjamaah dan pemberian kajian keislaman lainnya. (c) Kepemudaan, keterampilan dan kesenian yaitu bekerjasama dengan instansi lain untuk berpartisipasi membina warga binaan pemasyarakatan baik dengan mengirimkan tenaga penyuluh maupun tenaga terampil. (d) Menampilkan kegiatan anak didik pemasyarakatan pada even-even tertentu dan menginformasikan kegiatan di Lapas melalui media cetak dan sosial untuk menggugah masyarakat maupun instansi terkait untuk turut serta membantu membina warga binaan.⁸

⁸Sri Fatmawati, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Tesis Pascasarjana IAIN Antasari, 2015), h. XIII.

Penelitian ketiga adalah penelitian tesis saudara Saa'duddin, 2018, yang berjudul Pendidikan Islam Non Formal di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan Islam non formal di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yaitu mengetahui tentang latar belakang berdirinya majelis ta'lim dan kaji duduk di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan serta system pengelolaan dan pengajarannya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif,

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai lembaga pendidikan Islam Non Formal di kecamatan Juai, majlis ta`lim yang diteliti pada umumnya berdiri karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran akan terbatasnya pengetahuan keagamaan masyarakat setempat; rasa tanggung jawab guru agama, tokoh agama maupun masyarakat dalam proses pembinaan kehidupan beragama; keinginan untuk memanfaatkan sarana ibadah untuk syiar-syiar agama secara maksimal; pemanfaatan waktu dan menunaikan kewajiban menuntut ilmu sebagai muslim; serta sarana silaturahmi antar warga. Pengelolaan majlis ta`lim di kecamatan Juai ditangani oleh jajaran pengurus dan anggota jama`ah, masyarakat, pengurus masjid dan guru pengajian sendiri. Majlis ta`lim di kecamatan Juai pada umumnya mempunyai kepengurusan yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab II Konsep Manajemen, Pendidikan Nasional, Pendidikan Non Formal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Bab III Metodologi penelitian terdiri atas Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Paparan Data Penelitian terdiri dari profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Terakreditasi di Kota Banjarmasin dan Pembahasan tentang Manajemen Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi diasi di Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.